



## Pengukuran Kinerja Pendapatan Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Daerah: Studi Pada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024

Mega Tunjung Hapsari<sup>1</sup>, Alya Rahmalia Putri<sup>2</sup>, Eka Chusnul Wildad<sup>3</sup>, Nisa Rivia Hidayah<sup>4</sup>, Zuli Wahyuningtiyas<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

<sup>2-5</sup> Program Studi Manajemen Keuangan Syariah - S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

### Article Information

#### Article history:

Accepted: July 2025

Approved: October 2025

Published: December 2025

#### Keywords:

Kabupaten Barito Selatan  
Kemandirian Keuangan  
Pendapatan Asli Daerah  
Pertumbuhan Pendapatan  
Rasio Keuangan

### Abstract

*This study aims to analyze the financial performance of Barito Selatan Regency during the 2020–2024 period using a financial ratio approach. A descriptive quantitative method was applied based on secondary data obtained from regional financial reports and official publications of the Central Bureau of Statistics. The analysis includes the effectiveness ratio of local revenue (PAD), the ratio of direct and indirect expenditures, fiscal independence ratio, fiscal dependency ratio, and revenue growth ratio. The results indicate fluctuating PAD effectiveness, a persistent dominance of indirect spending, very low levels of fiscal independence, and consistently high dependency on central government transfers. Meanwhile, revenue growth shows a positive trend, especially in 2022–2024. These findings highlight structural challenges in the region's fiscal capacity and underscore the need to optimize PAD management and increase productive spending. The study implies that strengthening local fiscal independence requires not only improved financial management strategies but also capacity-building for human resources to enhance efficiency and support sustainable regional development.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Barito Selatan periode 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan daerah dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Analisis mencakup rasio efektivitas PAD, rasio belanja langsung dan tidak langsung, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, serta rasio pertumbuhan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD bersifat fluktuatif, belanja tidak langsung masih mendominasi struktur anggaran, tingkat kemandirian fiskal sangat rendah, dan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat tetap tinggi. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren positif, terutama pada periode 2022–2024. Temuan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi pengelolaan PAD dan peningkatan belanja produktif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah agar proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan efisiensi fiskal dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

How to Cite: Hapsari, M. T., Putri, A. R., Wildad, E. C., Nisa Rivia Hidayah, & Wahyuningtiyas, Z. Pengukuran Kinerja Pendapatan Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Daerah: Studi Pada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2024. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(4), 240–252. <https://doi.org/10.33633/jekobs.v4i4.14966>

 correspondence address:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Jalan Mayor Sujadi No. 46, Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung  
E-mail: [megahapsari@uinsatu.ac.id](mailto:megahapsari@uinsatu.ac.id), [putriyahmalia@gmail.com](mailto:putriyahmalia@gmail.com),  
[ekawildad@gmail.com](mailto:ekawildad@gmail.com), [nisarvh04@gmail.com](mailto:nisarvh04@gmail.com), [zulitiyas3@gmail.com](mailto:zulitiyas3@gmail.com)

ISSN

2964-8866 (online)





## PENDAHULUAN

Pendapatan daerah menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Tingginya pendapatan daerah mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengendalikan serta mengkaji sumber keuangan secara swasembada demi memenuhi kebutuhan masyarakat (Shafwah dkk., 2024). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan (Amu dkk., 2023).

Penerapan otonomi daerah memberikan perhatian besar pada kemandirian keuangan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai. Tingkat kemandirian tersebut terlihat dari besarnya tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan belanja daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Bakar & Said, 2021). Aturan ini menekankan pentingnya meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) supaya mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada alokasi dana dari pemerintah pusat, serta dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara lebih efektif dan efisien.

Capaian pendapatan daerah dapat dinilai menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis tersebut mencakup rasio efektivitas, rasio belanja langsung dan tidak langsung, serta rasio kemandirian. Dengan pendekatan ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pencapaian target pendapatan, perbandingan belanja langsung dan tidak langsung terhadap seluruh anggaran, serta tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap alokasi dana pemerintah pusat. (Fathah, 2017). Pendekatan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan keuangan daerahnya. Masa periode 2020-2024 menjadi penting untuk dianalisis karena dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi nasional setelah dampak pandemi COVID-19 serta perubahan kebijakan terkait transfer dana ke daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan menggunakan analisis rasio keuangan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pendapatan, proporsi belanja langsung dan tidak langsung, serta derajat kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi serta menghasilkan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan asal pendapatan dan meningkatkan kemandirian keuangan secara terus-menerus.

### Tinjauan Pustaka

#### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dan diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sinaga dkk., 2020). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen utama dalam pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, seperti yang juga diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1947 (Fatmawatie, 2016). Sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari total pendapatan daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan target penerimaan sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki oleh wilayahnya (Ode Abdul Manan dkk., 2024).

Studi-studi terkini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai efektivitas PAD yang optimal. Penelitian oleh (Aminuddin & Winarningsih, 2024) menemukan bahwa rata-rata efektivitas PAD kabupaten/kota di Indonesia masih berada pada kategori cukup efektif, namun belum mampu menopang belanja daerah secara mandiri. Temuan serupa juga

ditunjukkan oleh (Permatasari, 2025; Safitri & Widarjono, 2023), bahwa ketergantungan pada transfer pusat masih menjadi faktor dominan.

Oleh karena itu, pengukuran rasio efektivitas PAD tidak hanya menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi target fiskal, tetapi juga menjadi dasar penilaian terhadap kemandirian fiskal serta kualitas tata kelola pendapatan daerah. Efektivitas tersebut biasanya diperoleh melalui analisis perbandingan antara jumlah realisasi pendapatan yang tercapai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Berikut formula yang digunakan sebagai instrumen dalam menilai tingkat efektivitas pendapatan asli daerah (Amu dkk., 2023).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Kriteria       | Efektifitas PAD |
|----------------|-----------------|
| Tidak efektif  | <60%            |
| Kurang efektif | 60% - 80%       |
| Cukup efektif  | 80% - 90%       |
| Efektif        | 90% - 100%      |
| Sangat efektif | >100%           |

Persentase efektivitas PAD menunjukkan perbandingan realisasi penerimaan PAD terhadap target yang telah ditentukan, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100 persen. Nilai persentase tersebut berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan sesuai dengan potensi yang telah direncanakan sebelumnya (Amu dkk., 2023).

Jika hasil persentase  $\geq 100\%$ , berarti penerimaan PAD sangat efektif karena realisasi melebihi target yang telah ditentukan. Jika berada pada kisaran 90%–99%, maka penerimaan dikatakan efektif karena hampir mencapai target. Persentase 80%–89% mencerminkan cukup efektif, artinya daerah mendekati target meskipun belum sepenuhnya tercapai. Bila berada pada kisaran 60%–79%, maka penerimaan dianggap kurang efektif, sedangkan jika  $< 60\%$ , berarti sangat tidak efektif karena jauh dibawah target yang direncanakan (Moridu & Ode, 2018). Persentase ini digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi seberapa jauh pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan pendapatan sesuai dengan rencana potensi yang sudah ditentukan.

#### Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Pengeluaran langsung adalah jenis pengeluaran yang secara langsung mendukung pelaksanaan kegiatan atau proyek tertentu yang diatur oleh SKPD. Sementara itu, Belanja Tidak Langsung merujuk pada jenis pengeluaran pemerintah daerah yang tidak secara langsung memunculkan kegiatan atau proyek tertentu, namun tetap penting untuk menjaga kelancaran fungsi pemerintah secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pengeluaran langsung merujuk pada pengeluaran yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, belanja tidak langsung adalah jenis pengeluaran yang tidak memiliki hubungan langsung melalui penyelenggaraan kegiatan tersebut. (Mahmudi, 2010)

Sejumlah penelitian menekankan pentingnya komposisi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Saputra et al., 2021) menemukan bahwa belanja langsung memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan output ekonomi dibandingkan belanja tidak langsung. Sementara itu, studi oleh (Hariani & Febriyastuti, 2020) menunjukkan bahwa daerah dengan porsi belanja langsung yang lebih besar memiliki tingkat efisiensi fiskal yang lebih baik. Studi internasional oleh (Andersson Järnberg & Värja, 2023) juga menegaskan bahwa kualitas belanja publik mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, rasio BL dan BTL menjadi alat

analisis penting untuk menilai apakah alokasi anggaran pemerintah daerah sudah diarahkan kepada kegiatan produktif atau masih dominan terserap oleh belanja rutin.

Analisis terhadap rasio antara belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran pemerintah. Belanja langsung mencakup pengeluaran yang berkaitan langsung dengan program tertentu, sementara belanja tidak langsung mencakup dana yang dikeluarkan seperti gaji pegawai dan subsidi yang tidak terkait langsung. Idealnya, rasio belanja langsung seharusnya lebih tinggi untuk memastikan bahwa fokus pengeluaran hanya pada kegiatan yang produktif. Rasio ini berguna untuk menganalisis proporsi belanja yang dialokasikan untuk pengeluaran secara langsung dan pengeluaran tidak langsung. Rasio ini dihitung dengan membandingkan setiap jenis belanja terhadap total belanja daerah. Berikut adalah kriteria rasio BL dan BTL.

$$Belanja\ Langsung = \frac{Total\ Belanja\ Langsung}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

$$Belanja\ Tidak\ Langsung = \frac{Total\ Belanja\ Tidak\ Langsung}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Kriteria pada rasio BL dan BTL yakni jika Rasio belanja langsung lebih tinggi dari Rasio belanja tidak langsung maka artinya kinerja belanja secara langsung dianggap Baik. Kemudian jika Rasio belanja langsung lebih rendah dari rasio belanja tidak langsung maka artinya kinerja belanja secara langsung dianggap Kurang Baik.

Tabel 2. Perbedaan Utama antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

| Aspek                | Belanja Langsung   | Belanja Tidak Langsung           |
|----------------------|--|----------------------------------|
| Ketertarikan Program | Memiliki kaitan langsung dengan kegiatan                 | Tidak memiliki kaitan langsung   |
| Sifat Anggaran       | Bersifat Fleksibel sesuai dengan program yang dijalankan | Wajib, bersifat rutin            |
| Contoh               | Belanja terkait pembangunan jalan, pelatihan sumber daya | Gaji pegawai, bantuan sosial     |
| Output               | Spesifik dan memiliki ukuran yang jelas                  | Tidak selalu terukur             |
| Sifat Pengawasan     | Lebih mudah dikontrol hasilnya                           | Lebih administratif dan normatif |

Sumber: Seputar Birokrasi

Rasio pengelolaan pengeluaran menunjukkan bahwa kegiatan pengeluaran pemerintah daerah mencapai keseimbangan positif antara periode, artinya total pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Selain itu, rasio ini menunjukkan apakah terdapat surplus atau defisit anggaran, di mana surplus atau defisit merujuk pada selisih antara pendapatan dan pengeluaran pada periode pelaporan, baik berupa kelebihan maupun kekurangan (Nanik wahyuni, 2007).

Hingga saat ini, belum terdapat pedoman optimal mengenai rasio antara pengeluaran langsung dan tidak langsung, karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pembangunan serta kebutuhan investasi yang esensial dalam mencapai target pertumbuhan yang diharapkan. (Halim, 2012).

#### Rasio Kemandirian Keuangan

Indikator kemandirian keuangan daerah berperan dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah sanggup menanggung biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta layanan publik dengan memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah seperti pajak serta retribusi. Melalui rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pembiayaan eksternal, khususnya transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi (Dilliana & Herdi, 2022).

Selain itu, indikator ini berfungsi untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan sumber keuangan sendiri tanpa bergantung pada dukungan pendanaan dari pihak eksternal (Cheryl dkk., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh (Indriawati & Hasmarini, 2025) menunjukkan bahwa kemandirian daerah di Indonesia rata-rata masih berada dalam kategori sangat rendah. Bahkan, menurut (Jeddawi, 2021), lebih dari 75% daerah masih bergantung pada transfer pusat dalam membiayai belanja publik. Sementara itu, penelitian (Rahmayani & Kurniadi, 2022) menekankan bahwa kemandirian fiscal sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengukuran rasio kemandirian keuangan diperoleh melalui analisis perbandingan antara pendapatan asli daerah terhadap keseluruhan penerimaan daerah yang mencakup dana transfer dari pemerintahan pusat, transfer provinsi, serta pinjaman. Apabila nilai rasio tersebut meningkat, maka hal itu menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi, yang berarti kondisi keuangan daerah semakin baik (Dilliana & Herdi, 2022).

Rumus perhitungannya, sebagaimana dikemukakan oleh (Adinda Yasinta Nurul Hasan dkk., 2024), yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Tabel berikut menunjukkan kategori tingkat kemandirian keuangan daerah (Zainul Muzaki M & Tunjung Hapsari, 2022):

| Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah |             |
|---|-------------|
| Kriteria  | Kemandirian |
| Sangat Rendah   | 0% - 25%    |
| Rendah  | 25% - 50%   |
| Sedang  | 50% - 70%   |
| Tinggi  | 70% - 100%  |

Berdasarkan tabel diatas, menurut (Adinda Yasinta Nurul Hasan dkk., 2024), tingkat kemandirian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Jika persentase berada pada rentang 0,00% hingga 25,00%, maka masuk dalam kategori sangat rendah yang bersifat *instruktif*. Apabila berada pada 25,01% sampai 50,00%, dikategorikan sebagai rendah dengan pola *konsultatif*. Selanjutnya, nilai 50,01% hingga 75,00% menunjukkan tingkat kemandirian sedang yang bersifat *partisipatif*. Sedangkan apabila persentase lebih dari 75%, maka termasuk kategori tinggi yang cenderung *delegatif*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pola *instruktif* menggambarkan dominasi pemerintah pusat yang masih lebih besar dibandingkan kapasitas daerah, sehingga daerah belum dianggap dapat melaksanakan otonominya tanpa ketergantungan. Selanjutnya, pada pola *konsultatif*, campur tangan dari pemerintahan pusat mulai mengalami penurunan karena daerah dianggap semakin mampu mengelola kewenangannya sendiri. Pada pola *partisipatif* memperlihatkan semakin sedikitnya keterlibatan pemerintah pusat, karena daerah hampir sepenuhnya bisa menyelesaikan urusan otonomi. Sementara pada pola *delegatif*, keterlibatan pemerintah pusat tidak lagi dibutuhkan sebab daerah telah sepenuhnya memiliki kapasitas untuk menjalankan otonomi secara penuh (Akhmad, 2019).

#### Rasio Ketergantungan Keuangan

Indikator ketergantungan keuangan adalah indikator penting yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu pemerintahan daerah masih mengandalkan sumber pembiayaan dari luar daerah, khususnya dari dana transfer (Tunjung Hapsari dkk., 2024). Menurut (Maria, 2013), rasio ini juga mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengandalkan dukungan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Dalam konteks Indonesia, ketergantungan fiskal masih menjadi tantangan besar. Penelitian oleh (Kusuma & Anwar, 2024) menemukan bahwa sebagian besar daerah memiliki rasio ketergantungan di atas 60%. Hasil ini diperkuat oleh studi (Nadofah et al., 2025), yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada DAU dan DAK masih sangat tinggi terutama di daerah kabupaten.

Nilai rasio ketergantungan dihitung melalui perbandingan antara dana transfer yang masuk ke daerah terhadap total penerimaan yang diperoleh. Peningkatan nilai rasio menandakan bahwa ketergantungan keuangan daerah pada pemerintahan pusat juga semakin besar (Fathiyah dkk., 2022).

Rasio ketergantungan keuangan dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Fathiyah dkk., 2022):

$$Rasio\ Ketergantungan\ Keuangan = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan}$$

Tabel berikut menunjukkan pengelompokan tingkat ketergantungan keuangan daerah (Aminuddin & Winarningsih, 2024):

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

| Kriteria      | Ketergantungan  |
|---------------|-----------------|
| Sangat Rendah | 00,00 - 10,00%  |
| Rendah        | 10,01% - 20,00% |
| Sedang        | 20,01 – 30,00%  |
| Cukup         | 30,01 – 40,00%  |
| Tinggi        | 40,01 – 50,00%  |
| Sangat Tinggi | >50%            |

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori. Presentase pada interval 0,00–10,00% diklasifikasikan ke dalam kategori sangat rendah. Sementara itu, nilai antara 10,01–20,00% digolongkan rendah. Apabila berada pada 20,01–30,00% menunjukkan kategori sedang. Untuk presentase 30,01–40,00% digolongkan cukup. Jika berada dikisaran 40,01–50,00%, termasuk kategori tinggi. Sedangkan presentase lebih dari 50%, maka dikategorikan sebagai sangat tinggi.

Dengan demikian, rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan bahwa peningkatan nilai rasio akan diikuti oleh meningkatnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat maupun provinsi (Tunjung Hapsari dkk., 2024).

#### Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik kemampuan daerahnya dapat menjaga posisinya secara ekonomi di tengah tantangan perekonomian dan industri tempatnya beroperasi (Hikmah dkk., 2023). Rasio pertumbuhan berguna bagi memahami seperti apa kinerja pemerintah daerah pada periode anggaran tertentu atau hanya beberapa tahun anggaran (Fathah, 2017). sehingga hasil anggaran menunjukkan perkembangan baik dalam hal pemasukan maupun pembelian yang dapat bersifat baik atau buruk (Arfah dkk., 2023).

Studi (Zakaria & Syahputra, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inovasi layanan publik, dan efektivitas pemungutan PAD. Penelitian lain oleh (Hanifah & Sulaeman, 2022) menemukan bahwa daerah dengan basis ekonomi yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan pendapatan yang stabil.

Rasio pendapatan dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$Rasio\ Pertumbuhan\ Pendapatan = \frac{Pendapatan\ Th_t - Pendapatan\ Th_{(t-1)}}{Pendapatan\ Th_{(t-1)}} \times 100\%$$

Penaksiran tingkat pertumbuhan bertujuan dalam menganalisis perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran maka dapat ditunjukkan nilai aspek mana yang sebaiknya mendapat perhatian lebih (Putra dkk., 2023). Kategori pertumbuhan pendapatan daerah yaitu, Presentase 10% atau lebih setiap tahunnya

dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatan sangat tinggi, keadaan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau penerapan strategi pengelolaan yang efisien, baik di tingkat pemerintahan daerah. Presentase rentang 5 hingga 10% per tahun Rasio pertumbuhan pendapatan dikatakan tinggi, maka pertumbuhan yang terjadi mencerminkan kinerja yang cukup stabil meskipun masih belum mencapai tingkat optimal dan ada kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut. Presentase di bawah 5% per tahun dapat dikatakan rasio pertumbuhan pendapatannya Rendah, kondisi ini biasanya menunjukkan adanya stagnasi kendala pengelolaan atau bahkan penurunan kinerja pendapatan yang harus segera diatasi dengan rencana perbaikan. hal ini ditunjukkan bahwa pertumbuhan ini bernilai negatif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja pendapatan Kabupaten Barito Selatan melalui analisis rasio keuangan selama periode 2020–2024. Pemilihan periode lima tahun dilakukan untuk memperoleh gambaran tren yang konsisten, stabil, dan representatif atas perubahan kinerja keuangan daerah dalam satu siklus kebijakan APBD, termasuk sebelum dan sesudah perubahan regulasi transfer pusat terhadap pemerintah daerah.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang berasal dari sumber resmi, meliputi:

- (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Barito Selatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Publikasi keuangan daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- (3) Data statistik pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Selatan. Semua data yang digunakan merupakan data final dan telah melalui proses audit atau verifikasi sesuai standar pemerintah.

Sampel penelitian terdiri dari seluruh komponen data pendapatan daerah yang relevan untuk perhitungan rasio, seperti PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kriteria pemilihan data didasarkan pada kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaian dengan indikator rasio yang dianalisis. Dengan demikian, seluruh data dari tahun 2020 hingga 2024 digunakan secara menyeluruh tanpa pengecualian.

Setiap rasio dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan dalam literatur keuangan daerah dan dibandingkan antar-tahun (analisis komparatif) untuk mengidentifikasi perubahan kinerja selama periode penelitian. Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria standar penilaian rasio keuangan daerah untuk memastikan keandalan dan objektivitas analisis.

Dengan prosedur ini, penelitian mampu menyajikan gambaran kinerja pendapatan daerah secara sistematis, terukur, serta sesuai dengan standar evaluasi keuangan pemerintah daerah.

## HASIL DAN DISKUSI

### Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2020–2024, terlihat bahwa capaian PAD berfluktuasi setiap tahunnya. Fluktuasi ini menunjukkan adanya hubungan erat dengan dinamika ekonomi daerah selama masa pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2020, tingkat efektifitas hanya mencapai 65,23%, sehingga dikategorikan kurang efektif. Kondisi ini membaik secara signifikan pada tahun 2021 dengan tingkat efektifitas 99,22%, yang termasuk kategori efektif dan menunjukkan kemampuan daerah merealisasikan PAD mendekati target yang telah ditentukan. Kondisi ini sejalan dengan mulai pulihnya sektor-sektor ekonomi lokal, terutama sektor perdagangan dan jasa. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, sehingga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang akhirnya berdampak pada peningkatan PAD.

Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Tahun | Realisasi PAD<br>(dalam ribu rupiah) | Target PAD<br>(dalam ribu rupiah) | Percentase<br>(%) | Kriteria       |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 2020  | 56.790,41                            | 63.640,25                         | 65,23             | Kurang efektif |
| 2021  | 97.742,35                            | 95.778,09                         | 99,22             | Efektif        |
| 2022  | 80.625,16                            | 98.065,79                         | 82,21             | Cukup efektif  |
| 2023  | 72.039,46                            | 92.199,04                         | 78,13             | Kurang efektif |
| 2024  | 71.360,46                            | 90.112,75                         | 79,19             | Kurang efektif |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025; Perbup Barito Selatan No 18 Tahun 2020, 2020)

Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 82,21% yang hanya masuk kategori cukup efektif, meskipun masih berada di atas 80%. Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2023 dan 2024, dengan tingkat efektivitas masing-masing sebesar 78,13% dan 79,19%, yang kembali berada pada kategori kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum cukup stabil. Hal ini dikaitkan dengan tidak optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kinerja PAD Kabupaten Barito Selatan cenderung belum cukup stabil dan menghadapi fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan perlunya strategi optimalisasi pengelolaan PAD yang lebih konsisten agar capaian pendapatan dapat dipertahankan pada tingkat efektif atau bahkan sangat efektif di tahun-tahun berikutnya.

#### Analisis Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 6. Rasio BL dan BTL Kab. Barito Selatan 2020-2024

| Tahun     | Belanja langsung (BL) | Belanja Tidak Langsung (BTL) | Total Belanja | BL (%) | BTL (%) | Kinerja     |
|-----------|-----------------------|------------------------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 2020      | 414.247,39            | 403.166,17                   | 817.413,56    | 50,62  | 49,32   | Kurang baik |
| 2021      | 363.413,96            | 603.158,36                   | 970.572,32    | 37,44  | 62,14   | Kurang baik |
| 2022      | 432.286,40            | 588.976,97                   | 1.021.263,41  | 42,33  | 57,67   | Kurang baik |
| 2023      | 550.674,86            | 643.047,08                   | 1.193.721,94  | 46,13  | 53,87   | Kurang baik |
| 2024      | 940.190,93            | 785.859,33                   | 1.726.050,27  | 54,47  | 45,53   | Kurang baik |
| Rata-rata | 540962,908            | 604041,18                    | 1145944,30    | 46,99  | 53,31   | Kurang baik |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025)

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat disampaikan bahwa rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung pada total belanja Kabupaten Barito Selatan periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang kurang baik atau kurang optimal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai rasio belanja langsung lebih rendah daripada rasio belanja tidak langsung. Dengan persentase rata-rata belanja langsung sebesar 46,99%, yang lebih rendah dibandingkan rasio belanja tidak langsung yakni 53,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama 5 tahun, belanja Kabupaten Barito Selatan lebih terfokus pada pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaannya.

Secara makro, dominasi belanja tidak langsung berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif. Dalam konteks pengganda fiskal, belanja langsung seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program pemerintah cenderung memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika proporsi belanja produktif rendah, maka kontribusi pemerintah terhadap percepatan ekonomi dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga menjadi terbatas.

Dengan demikian, hasil rasio BL-BTL mengindikasikan bahwa strategi penganggaran pemerintah daerah belum diarahkan secara optimal untuk mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

#### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan

Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah dapat ditemukan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020–2024

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Transfer | RKKD   | Kinerja Kemandirian Keuangan |
|-------|------------------------|---------------------|--------|------------------------------|
| 2020  | 56.790,41              | 903.135,07          | 6,29%  | Sangat Rendah                |
| 2021  | 97.742,35              | 878.325,61          | 11,13% | Sangat Rendah                |
| 2022  | 80.625,16              | 1.045.252,09        | 7,71%  | Sangat Rendah                |
| 2023  | 72.039,46              | 1.181.336,95        | 6,10%  | Sangat Rendah                |
| 2024  | 71.360,73              | 1.750.457,87        | 4,08%  | Sangat Rendah                |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020–2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020, 2022, 2023, 2025)

Merujuk pada tabel diatas, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Barito Selatan selama periode 2020–2024 terlihat berada pada kategori yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD belum mampu menunjang pembangunan daerah secara mandiri. Pada tahun 2020, rasio kemandirian naik dari 6,29% menjadi 11,13% di tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan kembali menjadi 7,71% di tahun 2022, 6,10% di tahun 2023, dan 4,08% di tahun 2024. Seluruh capaian rasio yang berada dibawah 25% menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang masih *sangat rendah* dengan pola hubungan yang bersifat *instruktif*. Akibatnya, pemerintah daerah belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik secara mandiri. Rendahnya kemandirian daerah juga berkaitan dengan kemampuan kabupaten dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana yang ada dalam capaian IPM.

Dengan demikian, rasio kemandirian yang rendah tidak hanya menunjukkan tantangan fiskal, tetapi juga berpengaruh terhadap keterbatasan daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan

Hasil analisis rasio ketergantungan keuangan daerah dapat ditemukan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Barito Selatan Tahun 2020–2024

| Tahun | Pendapatan Transfer | Total Pendapatan Daerah | RKKD   | Kategori Kemampuan Keuangan |
|-------|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|
| 2020  | 903.135,07          | 987.379,42              | 91,46% | Sangat Tinggi               |
| 2021  | 878.325,61          | 999.994,46              | 87,84% | Sangat Tinggi               |
| 2022  | 1.045.252,09        | 1.129.289,99            | 92,56% | Sangat Tinggi               |
| 2023  | 1.181.336,95        | 1.254.586,71            | 94,16% | Sangat Tinggi               |
| 2024  | 1.750.457,87        | 1.826.398,48            | 95,84% | Sangat Tinggi               |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020–2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025)

Data pada tabel di atas mengindikasikan bahwa selama periode 2020–2024 rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Barito Selatan konsisten berada di atas 50%, yang berarti tingkat ketergantungannya termasuk sangat tinggi. Pada 2020, nilai rasio tercatat 91,46% dan sedikit menurun pada 2021 menjadi 87,84%. Akan tetapi, pada 2022 kembali naik menjadi 92,56%, lalu meningkat lagi menjadi 94,16% pada 2023, dan mencapai 95,84% di 2024. Tingginya rasio ini memperlihatkan bahwa keuangan daerah masih

dominan ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dan stabilitas fiskal daerah masih sangat bergantung terhadap kebijakan APBN. Selain itu, peranan pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas, sehingga belum mampu mengurangi ketergantungan.

Dalam konteks ekonomi makro, ketergantungan seperti ini membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, termasuk perubahan formula DAU, DAK, maupun transfer ke daerah lainnya. Tingginya ketergantungan juga menunjukkan rendahnya kapasitas daerah dalam menciptakan ruang fiskal (*fiscal space*) yang fleksibel untuk membiayai inisiatif pembangunan daerah. Dengan terbatasnya ruang fiskal, daerah sulit melakukan inovasi kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

#### Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

| Tahun     | Pendapatan (Juta) | Pertumbuhan | Kategori |
|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 2020      | 987.379,42        | 0,24%       | Rendah   |
| 2021      | 999.994,46        | 1,28%       | Rendah   |
| 2022      | 1.129.289,99      | 12,93%      | Tinggi   |
| 2023      | 1.254.586,71      | 11,09%      | Tinggi   |
| 2024      | 1.826.398,48      | 45,57%      | Tinggi   |
| Rata-Rata | 1.1977.111,40     | 14,22%      | Tinggi   |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan 2020-2024 (BPS Kabupaten Barito Selatan, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025)

Menurut analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatannya hanya mencapai 0,24% yang tergolong sebagai rendah, yang mengindikasikan bahwa kondisi pertumbuhan relatif tidak berkembang. Pada awal tahun 2022, terjadi peningkatan mencapai 12,93%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan pendapatan. Namun, pada tahun 2023, angka pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan kecil menjadi sebesar 11,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih berada pada kategori tinggi, menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan tetap efektif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024, di mana meningkat hingga mencapai 45,57% dengan kategori sangat tinggi. Oleh karena itu, rata rata dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 14,22%, yang termasuk dalam kategori tinggi, Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kinerja yang baik dan progresif dalam pertumbuhan pendapatan serta pengelolaan pendapatan daerah.

Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kemandirian daerah, karena sebagian besar pertumbuhan masih disumbang oleh dana transfer. Artinya, meskipun pendapatan meningkat, struktur pendapatan daerah belum menggambarkan kemampuan fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri. Keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan dan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa pendapatan yang meningkat belum sejalan dengan upaya optimalisasi PAD, sehingga potensi fiskal daerah masih belum dimanfaatkan secara maksimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Terkait dengan analisis rasio keuangan daerah kabupaten Barito Selatan 2020-2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. Keefektifan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kinerja Dari tahun ke tahun, capaian tertinggi dicapai pada tahun 2021 yang mencapai 99,22% (tergolong efektif). Namun, angka ini menunjukkan penurunan pada tahun-tahun selanjutnya. Komposisi pengeluaran juga ditampilkan secara keseluruhan, di mana belanja tidak langsung lebih mendominasi dibandingkan dengan belanja langsung yang menunjukkan bahwa kinerja pengeluaran dinilai kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, rasio tingkat kemandirian keuangan daerah saat ini masih tergolong rendah sekali, yaitu di bawah 25%, ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap alokasi dari pemerintah pusat dan provinsi, terlihat dari rasio ketergantungan yang selalu melebihi 85% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Selatan belum memiliki kekuatan fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan daerah secara mandiri. Kondisi ini menandakan bahwa PAD belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Namun, Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata sebesar 14,22 persen dalam kategori tinggi, yang menunjukkan adanya peluang besar untuk peningkatan kinerja fiskal di masa depan.

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara wilayah yang punya pertumbuhan penghasilan yang cukup besar dan daerah yang tingkat kemandirianya masih rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pendapatan, daerah masih belum mampu memaksimalkan PAD sebagai sumber utama untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pendapatan di tingkat daerah masih belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan mengoptimalkan strategi pengelolaan PAD dengan meningkatkan intensitas dan memperluas berbagai sumber pendapatan daerah, khususnya perbaikan dalam cara berbelanja dengan meningkatkan rasio pengeluaran langsung yang bersifat produktif, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan di daerah. Usaha untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dengan memberikan prioritas melalui kebijakan fiskal yang lebih inovatif dan fokus pada potensi daerah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar studi-studi sejenis ini tidak hanya fokus pada rasio keuangan. Namun, juga menggabungkan analisis lainnya yang lebih banyak, agar catatan kinerja pemerintah daerah dapat dipahami lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Yasinta Nurul Hasan, Aqilla Nabbihah, Berlian Gustina Riyadi, Ferdiaz Riandra Febrilliant, Renita Syilviana, & Mega Tunjung Hapsari. (2024). Kinerja Keuangan dan Belanja Kota Pasuruan Tahun 2019-2023. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(1), 18–25. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2680>
- Akhmad. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris* (Amir, Ed.; pertama, Nomor February). Pustaka AQ.
- Alyumna Asfiatul Hikmah, Edi Murdiyanto, & Zulfia Rahmawati. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021. *MASMAN : Master Manajemen*, 1(4), 13–26. <https://doi.org/10.59603/masman.v1i4.144>
- Aminuddin, N., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(1), 404–427. <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i1.1416>
- Amu, A. P., Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntasi*, 2(3), 291–307.
- Andersson Järnberg, L., & Värja, E. (2023). *The composition of local government expenditure and income growth: the case of Sweden*. *Regional Studies*, 57(9), 1784–1797. <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2131755>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1–20.
- BPS Kabupaten Barito Selatan. (2020). *Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Barito Selatan.
- BPS Kabupaten Barito Selatan. (2021). *Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2021* (T. N. Hidayat, Ed.). BPS Kabupaten Barito Selatan.

- BPS Kabupaten Barito Selatan. (2022). *Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2022*.
- BPS Kabupaten Barito Selatan. (2023). *Kabupaten Barito Selatan dalam angka 2023* (T. N. Hidayat, Ed.).  
BPS Kabupaten Barito Selatan.
- BPS Kabupaten Barito Selatan. (2025). *Kabupaten Barito Selatan dalam Angka 2025* (M. M. Sinsky, Ed.; Vol. 17). BPS Kabupaten Barito Selatan.
- Cheryl, A., Putri, P. A., Pangesti, R. A., Sofa, R. N., Wahyuningrum, A., Priandini, S. H. D., & Hapsari, M. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun2018-2023. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 57–64. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.394>
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah* (D. Winarni, Ed.; 1 ed.). Eureka Media Aksara.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.
- Fathiyah, F., Iskandar Nasution, Bambang Niko Pasla, Fahmi Rasid, & Muhammad Arif. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v3i1.43>
- Fatmawatie, N. (2016). *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*. Nadi Offset.
- Hanifah, H. I., & Sulaeman, A. S. (2022). PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS KORELASI RESIPROKAL. *JDEP*, 5(2), 146–172. [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika\\_pembangunan/index](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index)
- Hariani, E., & Febriyastuti, R. (2020). The Effect of Fiscal Stress, Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Efficiency Ratio of Government Independence Performance. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(1). <https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p018>
- I Made Agus Surya Adi Putra, I Nyoman Alit Puspadma, & I Made Aditya Mantara Putra. (2023). Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 32–37. <https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8642.32-37>
- Indriawati, S., & Hasmarini, M. I. (2025). Fiscal Independence Analysis Based On Regional Income Structure Of Regency And City Of Central Java Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(6), 633–641. <http://journal.yrpipku.com/index.php/msej>
- Jeddawi, M. F. H. (2021). ALTERNATIF STRATEGI MENEKAN KESENJANGAN KEMANDIRIAN FISKAL ANTAR DAERAH DI INDONESIA. *Ejournal IPDN*.
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 223–233. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art14>
- Maria. (2013). Analisis Rasio Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 9(4), 36–45.
- Moridu, I., & Ode, H. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KONTRIBUSI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI. *Jurnak EMOR*, 2(2), 167–183.
- Nadofah, Jaenudin, M., & Utami, A. F. (2025). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA: EVALUASI 38 PROVINSI DALAM ERA DESENTRALISASI. *DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL: ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 15(01), 34–46. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>
- Ode Abdul Manan, L., Suharlian, Sufrianto, & Septiani. (2024). ANALISIS DAMPAK PENDAPATAN ASLI DERAH TERHAAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA KENDARI. *Sultra Journal of Economic and Business*, 5(1), 214–222.
- Perbup Barito Selatan No 18 Tahun 2020 (2020).
- Permatasari, Rr. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2021-2024. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(4), 16. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.2900>

- Rahmayani, M. W., & Kurniadi, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 2622–5379.
- Safitri, D. U. R., & Widarjono, A. (2023). Analisis efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum Kabupaten atau Kota di Pulau Kalimantan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art15>
- Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 129–134. <https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810>
- Shafwah, R., Masradin, & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Net*, 7(1), 282–289.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350>
- Tunjung Hapsari, M., Fitriani, E. D., Ira Sri Agmiana, Arina Eka Nur Fadhilah, Rihhadatul Aisy Qatrunnada S, Chasa Puput Tri Mei A, & Saraya Izzati Shabira. (2024). Analisa Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Pendapatan, Pajak, dan Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 311–321. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.2679>
- Zainul Muzaki M, M., & Tunjung Hapsari, M. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efesiensi, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 – 2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 289–304. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548>
- Zakaria, R., & Syahputra, D. K. (2022). OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FISKAL. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1). [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)